



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI RIAU
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H.EDY NASUTION
2. Jabatan : WAKIL GUBERNUR
3. NHK : 1896

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.152.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/338 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/176.4 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 666 m2/224 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1369 m2/89 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 840 m2/48 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 883 m2/48 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1392 m2/196 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 4700 m2/150 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 752.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 132.000.000

1. MOTOR, Kanzen KMV-100 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1,5 E M CVT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 286.024.500



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.249.438.291
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.819.462.791
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.819.462.791

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.